



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI EVALUASI DAN PENGENDALIAN PARUH WAKTU PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), perlu dilakukan evaluasi dan pengendalian paruh waktu pada tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Paruh Waktu Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Paruh Waktu Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional; dan
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI EVALUASI DAN PENGENDALIAN PARUH WAKTU PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Paruh Waktu Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, serta memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Tim Pengarah, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun panduan teknis pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 meliputi evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan (agenda pembangunan dan *major project* terpilih) dan evaluasi manfaat pelaksanaan pembangunan;
 - b. menyusun panduan teknis pelaksanaan Pengendalian Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yang mencakup pengendalian pelaksanaan *major project* terpilih;
 - c. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait perihal evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan (agenda pembangunan dan *major project* terpilih);
 - d. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait perihal evaluasi manfaat pelaksanaan pembangunan;
 - e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait perihal pengendalian pelaksanaan *major project* terpilih;
 - f. menyusun laporan Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan (agenda pembangunan dan *major project* terpilih) dan evaluasi manfaat pelaksanaan pembangunan, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab; dan
 - g. menyusun laporan Pengendalian Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan *major project* terpilih, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KELIMA, didukung oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas:
- a. kelompok kerja evaluasi sasaran makro pembangunan;
 - b. kelompok kerja evaluasi dan pengendalian agenda pembangunan 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”;
 - c. kelompok ...

- c. kelompok kerja evaluasi dan pengendalian agenda pembangunan 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”;
- d. kelompok kerja evaluasi dan pengendalian agenda pembangunan 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”;
- e. kelompok kerja evaluasi dan pengendalian agenda pembangunan 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”;
- f. kelompok kerja evaluasi dan pengendalian agenda pembangunan 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”;
- g. kelompok kerja evaluasi dan pengendalian agenda pembangunan 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”;
- dan
- h. kelompok kerja evaluasi dan pengendalian agenda pembangunan 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

KETUJUH : Kelompok Kerja huruf a sampai dengan huruf h sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi hasil capaian kinerja pelaksanaan pembangunan;
- b. menyusun hasil capaian kinerja pelaksanaan pembangunan (agenda pembangunan dan *major project* terpilih);
- c. melaporkan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan kepada Ketua Tim Pelaksana;
- d. memberikan masukan dan sinkronisasi evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan evaluasi manfaat pelaksanaan pembangunan;
- e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan *major project* terpilih.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN : ...

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI EVALUASI DAN PENGENDALIAN PARUH WAKTU PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Inspektur Utama, Bappenas.
 2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA ...

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektorial, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas.
8. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Bappenas.
9. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MDEC, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Jessica Andrea Shinta, S.Ak, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Mohammad Riziq Syihab, S.P.W.K, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Kelompok Kerja Evaluasi Sasaran Makro Pembangunan

Ketua merangkap Anggota : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

- Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
11. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan.
12. Kepala Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik.
13. Eko Supriatno, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Karsinah, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Direktur ...

3. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas.
14. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan.
16. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
17. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian.
18. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Kementerian Investasi/BKPM.

19. Kepala ...

19. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.
 20. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 21. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
 22. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
 23. Ir. Bambang Triyono, Kementerian PPN/Bappenas.
 24. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
 25. Sinta Paramita, ST, M.T.I, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 7. Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis Badan Pengusahaan Batam;
 8. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Heriyadi ...

10. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Andi Setyo Pambudi, ST, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Novi Mulia Ayu, SE, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.
 14. Dwi Ratih Suryantining Esti, ST, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
 15. Ratri Ismayasti, ST, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 3
“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda dan Olahraga, Kementerian
PPN/Bappenas.
2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan.
 10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial.

11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama.
 12. Ir. Tubagus Achmad Chusni, MA, M.Phill, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Grace Second Lady Manalu, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
 14. Sigit Santoso, S.Pd, M.Pd, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 5. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 6. Dra. Esti Nurhayati, MM, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Afwandi, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Indra Wisaksono, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”

Ketua ...

- Ketua merangkap Anggota : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan.
9. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Rahmat Hidayat, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Ladislaus Ryanniro Tumanggor, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur ...

4. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 9. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 10. Kepala Biro Perencanaan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
 11. Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Anna Amalia, ST, M.Env, Kementerian PPN/Bappenas.
 14. Andreas Rudika Ardiyanto, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
 15. Ultamas Eka Rahmawan, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Kelompok Kerja Evaluasi dan Pengendalian Agenda Pembangunan 7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik"
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Politik, dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur ...

5. Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan, Kementerian Pertahanan.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara.
7. Kepala Biro Kebijakan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Husni Rohman, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Firdini, S.Hum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Nuzula Anggeraini, S.STP, M.PS, M.URP, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Yulia Agnis Sutarno, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
13. Amelia Ari Putri, S.K.Pm.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati